
**ETIKA POLITIK DALAM TRADISI ISLAM DAN BARAT:
PERBANDINGAN KONSEPTUAL ANTARA NASIRUDDIN TUSI
DAN IMMANUEL KANT**

Hopipah

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Moh. Rosul

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Abstrak:

Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan tujuan mengkaji pemikiran etika politik dua tokoh besar dari tradisi filsafat yang berbeda, yakni Nasiruddin Tusi dari peradaban Islam dan Immanuel Kant dari filsafat Barat. Dengan menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis Nasiruddin Tusi: membangun sistem etika politik yang integratif antara moralitas individu dan struktur pemerintahan yang adil, berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan filsafat klasik. Immanuel Kant: etika politik berbasis prinsip imperatif kategoris dengan penekanan pada otonomi moral individu dan kebebasan. Perbedaan tersebut menghasilkan titik temu bahwa moralitas merupakan fondasi utama dalam praktik politik. Perbedaan mencolok terdapat pada pendekatan filosofisnya, di mana Tusi memadukan aspek teologis dan empiris dalam kerangka sosial-politik, sedangkan Kant mengusung pendekatan rasional-sekuler yang menekankan konsistensi moral individual. Temuan dari keduanya terletak pada tata kelola politik yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan integritas.

Kata Kunci: Etika Politik, Nasirudin Tusi, Immanuel Kant

Abstract

This research is a comparative study with the aim of examining the political ethics thoughts of two great figures from different philosophical traditions, namely Nasiruddin Tusi from Islamic civilisation and Immanuel Kant from Western philosophy. By using literature study method, by analysing Nasiruddin Tusi: building an integrative political ethics system between individual morality and a just government structure, based on Islamic values and classical philosophy. Immanuel Kant: political ethics based on the principle of categorical imperative with emphasis on individual moral autonomy and freedom. These differences result in the common ground that morality is the main foundation of political practice. The striking difference is in the philosophical approach, where Tusi combines theological and empirical aspects in a socio-political framework, while Kant brings a rational-secular approach that emphasises individual moral consistency. The finding of both lies in political governance that upholds ethics, justice, and integrity.

Keywords: Political Ethics, Nasirudin Tusi, Immanuel Kant

PENDAHULUAN

Saat ini, di era globalisasi yang paling relevan dalam dunia politik adalah Ketika etika politik seakan terlupakan bahkan cenderung menghilang, mengingat tantangan dan dinamika politik yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Realitas yang ada menunjukkan bahwa etika politik dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk kepentingan sepihak, padahal etika politik berkaitan erat dengan nilai dan norma dalam masyarakat, serta menuntut di pertanggungjawabkan berdasarkan prinsip moral dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut sebetulnya telah diatur dalam asas negara kita, yaitu Pancasila namun, seiring berjalannya waktu asas-asas yang ada terlupakan dan itu seharusnya menjadi kekhawatiran kita bersama.¹

Etika politik ini telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti yang ada seperti Machiavelli seorang politikus asal Italia berpendapat bahwa etika sering dianggap sekunder dalam politik dan tidak dapat diterapkan dalam politik internasional, namun lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam pandangannya, mewujudkan kepentingan negara adalah hak yang sah. Tetapi sebaliknya, Islam memandang etika politik sebagai prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan HAM yang berkontribusi pada terciptanya kedamaian berkelanjutan berdasarkan norma-norma agama.²

Al-Mawardi juga berpendapat dalam karyanya “Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer”, dalam karyanya tersebut Al-Mawardi menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kepemimpinan dan pemerintahan suatu negara, serta penerapan nilai-nilai Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendekatan Al-Mawardi

¹ KARTIKA, I. Made. Nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 2015, 4.

² Alfiansyah et al., “Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli Dan Al Mawardi.” *Jurnal sosial dan Budaya Syari* 10, no 2 (2023); 2.

terhadap etika politik mencakup beberapa prinsip; 1). tanggung jawab moral, 2). keadilan, dan 3). partisipasi kolektif. Tujuannya adalah memberikan panduan berharga untuk mengatasi berbagai masalah politik dan sosial di dunia modern. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat kepercayaan public serta menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan bertanggung jawab.³

Dewi Dahlan dalam penelitiannya yang berjudul etika politik dalam islam (Konstruksi dan Perspektif) berpendapat bahwa etika dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah, sehingga pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ibadah. Ada dua alasan utama mengapa etika sangat penting dalam Islam. Pertama, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan niat Lillahi Ta'ala. Kedua, etika politik dianggap sangat penting karena berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam dalam managemen masyarakat. Berpolitik melibatkan hubungan antar manusia, seperti saling menghormati, menghargai hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam dunia politik. Namun, kajian mengenai etika politik Islam belum merata diketahui oleh semua umat, meskipun topik ini masih menjadi perbincangan di kalangan para pakar Muslim.⁴

Farah Sabilla Febriany juga mengemukakan bahwa Dalam konteks etika politik, manusia memiliki dimensi politis yang dapat dianalisis dari tiga aspek; pertama manusia sebagai makhluk sosial, kedua manusia memiliki dimensi kesosialan, dan yang terakhir dimensi politis dalam kehidupan manusia.

³ Sakhi, Amin, and Kurniati, "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10.2 (2024): 99-100.

⁴ Dahlan, "Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15.1 (2021).

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, tetapi tindakan tersebut menjadi berarti ketika berada di tengah-tengah suatu kelompok. Artinya, eksistensi manusia diakui karena keberadaan orang lain, manusia hanya dapat hidup dan berkembang berkat interaksi dengan sesama. Dimensi kesosialan tersebut mengacu pada penemuan jati diri individu saat berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, dimensi politis dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai pengatur kerangka kehidupan masyarakat, baik secara normatif maupun efektif.⁵

Dari berbagai pendapat para peneliti di atas, dapat dipahami bahwa etika politik adalah suatu sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam konteks pemerintahan dan penyelenggaraan masyarakat. Etika politik mencakup tanggung jawab moral, keadilan, dan partisipasi kolektif, yang memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan stabil. Dalam konteks Islam, etika politik dianggap sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan dengan niat yang tulus, serta melibatkan hubungan antar manusia yang saling menghormati dan menghargai.

Nashiruddin Tusi, adalah seorang filsuf Muslim asal Persia yang lahir pada abad ke-13M. Ia berpendapat bahwa politik yang etis harus dimulai dari pembentukan karakter individu yang bermoral, disusul dengan pengelolaan ekonomi yang bijak, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tatanan negara yang adil. Bagi Tusi, pemimpin politik tidak hanya dituntut untuk memiliki kecakapan administratif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan spiritual. Pemikirannya menunjukkan bahwa etika politik

⁵ Febriany and Dewi, "Nilai-Nilai Pancasila Dan Dinamika Etika Politik Indonesia." *jurnal Pendidikan Indonesia* 2.4 (2021): 693-693.

dalam Islam klasik telah memiliki struktur pemikiran yang sangat sistematis dan tidak kalah kompleks dibandingkan pemikiran filsafat politik Barat.⁶

Selanjutnya Immanuel Kant, menegaskan bahwa kebenaran merupakan prinsip moral mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia memperkenalkan konsep "imperatif kategoris" sebuah kewajiban moral universal yang menuntut individu untuk selalu bertindak secara etis, terlepas dari konsekuensinya. Dalam konteks ini, kebenaran bukanlah sesuatu yang fleksibel atau bergantung pada situasi politik, melainkan suatu keharusan etis yang melekat pada diri setiap individu. Kant memandang bahwa menciptakan keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari komitmen terhadap kebenaran. Menurutnya politik harus dibangun di atas landasan moral yang kokoh bukan kepentingan sesaat. Pandangan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori etika politik modern, sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas moral adalah kunci dalam pengambilan keputusan public.⁷

Meskipun berasal dari latar belakang peradaban, budaya, dan zaman yang berbeda, Nashiruddin Tusi dan Immanuel Kant menunjukkan kesamaan dalam hal menjadikan moralitas sebagai fondasi utama dalam politik. Keduanya menolak pandangan politik yang bersifat pragmatis dan menekankan pentingnya nilai etika yang tidak bisa dikompromikan dalam proses bernegara. Nashiruddin Tusi dalam karyanya "*The Nasirean Ethics*" menciptakan kerangka etika politik yang berakar pada pembentukan karakter individu, stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Ia melihat keterkaitan erat

⁶ MAHDI, Mahdi; YUNUS, Firdaus M. Konstruksi Ilmu Menurut Nashiruddin Ath-Thusi. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2023, 7.1: 53.

⁷BENDIANTO, Septian; ARMADA, Riyanto; ADON, Mathias Jebaru. REPRESENTASI KEBENARAN (VERUM) DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA: Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant. *Aggiornamento*, 2024, 4.02: 3-4

antara moral pribadi dan struktur pemerintahan yang baik. Sementara itu, Kant menawarkan pendekatan normatif melalui konsep "imperatif kategoris", di mana setiap tindakan politik harus tunduk pada prinsip moral universal yang berlaku tanpa pengecualian.⁸

Namun, perbedaan mencolok di antara keduanya terletak pada landasan filosofis dan metodologinya. Nashiruddin Tusi memadukan nilai-nilai spiritual Islam, filsafat Yunani, dan realitas sosial dalam menyusun etika politiknya. Pandangannya bersifat integratif dan kontekstual dengan pendekatan yang mencakup tiga ranah; 1). Etika, 2). Ekonomi, 3). Politik. Di sisi lain, Kant menekankan pendekatan rasional dan sekuler, yang mengutamakan prinsip otonomi moral individu dalam membentuk masyarakat yang adil. Bagi Kant politik adalah penerapan etika dalam skala publik yang menjunjung tinggi kebebasan, hukum, dan martabat manusia sebagai tujuan itu sendiri.

Melalui pendekatan studi pustaka yang menelaah karya-karya filosofis dari Nashiruddin Tusi dan Immanuel Kant, tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berasal dari latar belakang budaya dan era yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan mendasar dalam menempatkan nilai moral sebagai fondasi utama dalam praktik politik. Nashiruddin Tusi menekankan pentingnya integrasi antara moral pribadi, ekonomi dan tatanan politik dalam satu kerangka etika yang utuh, sedangkan Kant menekankan prinsip moral universal yang harus ditaati oleh setiap individu dan lembaga politik. Perbandingan ini membuktikan bahwa etika politik merupakan aspek lintas budaya dan lintas zaman yang esensial dalam membentuk masyarakat yang adil. Melalui studi pustaka ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran etis kedua tokoh tersebut tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan

⁸ Pradana, "PANDANGAN FILSAFAT PADA ETIKA MORAL TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI."

kontribusi yang signifikan terhadap wacana politik kontemporer yang semakin membutuhkan landasan moral yang kuat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai metode utama. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya asli dari Nasiruddin Tusi dan Immanuel Kant, serta interpretasi dari para pemikir kontemporer terkait etika politik keduanya. Fokus kajian diarahkan pada pemikiran etis-politik Tusi dalam kerangka filsafat Islam dan Kant dalam kerangka filsafat Barat modern, dengan penekanan pada prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam ruang politik.

Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan perspektif etika politik antara kedua tokoh tersebut. Peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengungkap struktur argumentatif serta nilai-nilai etis yang menjadi dasar pemikiran keduanya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi etika Tusi dan Kant dalam membangun dasar normatif bagi praktik politik yang adil dan bermoral.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Biografi Nasiruddin Tusi dan Emmanuel Kant

1. Biografi Nasiruddin Tusi

Nashiruddin Ath-Thusi, yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan Nashiruddin Ath-Thusi, lahir pada Sabtu dini hari, 11 Jumadil Awal 597 H atau bertepatan dengan 17 Februari 1201 M

di kota Tus atau wilayah sekitarnya. Ia wafat di Baghdad pada saat matahari terbenam, tepatnya pada 18 Dzulhijjah 672 H / 25 Juni 1274 M.⁹ Keilmuan al-Thusi begitu menonjol hingga ia diakui sebagai salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh pada masanya. Semasa hidupnya, al-Thusi telah menjadi sosok legendaris dan memperoleh berbagai gelar kehormatan, seperti "Khwaja" yang berarti ilmuwan dan guru besar. Ia juga dikenal dengan sebutan yang lebih prestisius, yakni "Ustaz al-Bashar" (guru umat manusia) dan "al-Mu'allim al-Tsalits" (guru ketiga setelah Aristoteles dan al-Farabi), yang menegaskan posisinya sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat Islam.¹⁰

Sepanjang hidupnya, Nashiruddin Tusi menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berpengaruh besar dalam dunia keilmuan Islam maupun Barat. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *Akhlaq-i Nasiri* (*The Nasirean Ethics*), sebuah buku filsafat etika yang menggabungkan pandangan etika Islam, Yunani, dan Persia, serta membahas hubungan antara etika, ekonomi, dan politik. Di bidang astronomi, ia menulis *Tadhkira fi 'Ilm al-Hay'ah* (Memoar tentang Astronomi), yang menjadi rujukan penting di dunia Islam dan kemudian juga di Eropa. Karya lainnya yang juga masyhur adalah *Sharh al-Isharat wa al-Tanbihat*, yaitu komentar atas karya Ibnu Sina, serta *Tajrid al-I'tiqad*, sebuah teks teologi rasional (kalam) yang digunakan di banyak madrasah Syiah dan Sunni. Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya dalam bidang matematika seperti *Risalah fi al-Jabr wa al-Muqabalah* dan logika seperti *Asas al-Iqtibas*. Beragam karyanya ini

⁹ Mahdi, Mahdi, and Firdaus M. Yunus. "Konstruksi Ilmu Menurut Nashiruddin Ath-Thusi." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 7.1 (2023): 53.

¹⁰ Jannah, Elly Uzlifatul, and Mohammad Sulthon. "Pengaruh Pemikiran Nashiruddin Al-Thusi terhadap Perkembangan Metode Penentuan Arah Kiblat." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27.1 (2024): 34.

menunjukkan betapa luasnya cakupan keilmuan al-Thusi dan pengaruhnya yang mendalam dalam perkembangan ilmu pengetahuan klasik.¹¹

2. Biografi Immanuel Kant

Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar asal Jerman yang lahir dari keluarga sederhana di Königsberg, Prusia Timur (sekarang Kaliningrad, Rusia) pada 22 April 1724.¹² Ayahnya bekerja sebagai pembuat pelana, sementara ibunya, meskipun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kant tumbuh dalam lingkungan keluarga Pietis yang sangat ketat secara religius. Sejak usia delapan hingga enam belas tahun, ia mengenyam pendidikan di sekolah Pietis lokal, di mana kecerdasannya mulai berkembang, meski sempat merasa tertekan oleh nasihat-nasihat religius yang berlebihan. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya sepanjang hidup dewasanya, Kant tidak pernah kembali ke gereja, walau nilai-nilai Pietisme, seperti kesederhanaan hidup dan moralitas yang tinggi, tetap mewarnai prinsip hidupnya. Melalui pemikiran dan karya-karyanya, Kant membawa perubahan besar dalam dunia filsafat Barat, terutama dalam bidang etika dan epistemologi. Ia wafat di kota kelahirannya, Königsberg, pada 12 Februari 1804.¹³

Immanuel Kant dikenal sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat, dan ia menghasilkan sejumlah karya besar yang menjadi fondasi pemikiran modern. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah

¹¹ Susanto, "Pemikiran Dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-T Susanto, Ahmad Budi. "Pemikiran dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-Thusi." *al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1.1 (2023): 34-35.

¹² Effendi, Rahmat. "Kewajiban dalam Pemikiran Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 12.2 (2020): 55.

¹³ Madani, Adha Santri, Fakhri Putra Tanoto, and Nisa Halwati. "Immanuel Kant dan Pemikiran Filsafatnya." *no. June* (2022): 3.

Critique of Pure Reason (Kritik atas Akal Budi Murni), yang membahas batas-batas pengetahuan manusia dan menjadi tonggak dalam filsafat epistemologi. Karya penting lainnya adalah *Critique of Practical Reason* (Kritik atas Akal Budi Praktis), yang mengembangkan dasar-dasar etika Kant, termasuk konsep terkenal tentang "imperatif kategoris". Selain itu, *Critique of Judgment* (Kritik atas Daya Menghakimi) juga menjadi bagian dari trilogi kritiknya, yang mengkaji estetika dan teleologi. Kant juga menulis *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, yang merumuskan prinsip-prinsip moral universal, serta *Perpetual Peace*, sebuah esai politik yang membahas gagasan tentang perdamaian abadi dan etika dalam hubungan antarnegara. Karya-karya tersebut menjadikan Kant sebagai pelopor penting dalam filsafat moral, politik, dan metafisika.¹⁴

B. Pemikiran Etika Politik Nasiruddin Thusi

Nasiruddin Tusi adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan cendekiawan besar dari dunia Islam yang hidup pada abad ke-13. Ia dikenal luas atas kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, logika, dan yang paling menonjol, filsafat etika. Salah satu karya monumental yang memperkuat posisinya sebagai pemikir besar dalam bidang etika adalah *Akhlaq-i Nasiri*, yang dalam literatur Barat dikenal sebagai *The Nasirean Ethics*. Karya ini menempati posisi penting dalam khazanah filsafat Islam klasik, terutama di kawasan Persia dan wilayah sekitarnya, karena keberhasilannya merumuskan sistem etika yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai moral universal dalam bingkai ajaran Islam.

Dalam *The Nasirean Ethics*, Tusi menyusun pemikiran moralnya dalam tiga bagian utama. Bagian pertama mengupas secara mendalam tentang etika individual, yang menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk mengatur

¹⁴ Putri, Aisyah Ramadanti Mulia, et al. "Empat Persoalan Filsafat Menurut Immanuel Kant." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.01 (2022), hlm. 7-8.

dirinya melalui kekuatan akal, pengendalian nafsu, serta manajemen emosi yang seimbang. Bagian kedua menjelaskan aspek etika dalam konteks kehidupan rumah tangga, termasuk pengelolaan hubungan suami-istri, relasi orang tua dan anak, serta pembagian peran dalam menciptakan harmoni keluarga. Sementara itu, bagian ketiga merupakan kontribusi paling signifikan terhadap diskursus etika sosial dan politik, di mana Tusi menekankan pentingnya keadilan, kualitas kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama masyarakat yang tertib dan beradab.¹⁵

Tusi mendefinisikan kebijaksanaan politik sebagai: "Refleksi atas hukum-hukum umum yang bertujuan untuk kebaikan bersama, demi tercapainya kerjasama dalam meraih kesempurnaan sejati." Dalam hal ini, ia sejalan dengan pandangan Farabi, yang meyakini bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dalam kerangka masyarakat yang tertata dengan baik. Konsep ini menunjukkan bahwa Tusi memahami politik bukan semata-mata sebagai mekanisme kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan bersama yang selaras dengan tujuan moral dan spiritual manusia.

Tusi menganggap bahwa manusia secara alami membutuhkan interaksi sosial. Ia menekankan bahwa munculnya peradaban dan berkembangnya kota-kota besar berakar dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bekerja sama. "Manusia secara kodrat memerlukan interaksi sosial, dan dari interaksi itu muncul peradaban yang berasal dari istilah 'kota'. Di kota lah orang-orang bekerja sama dalam berbagai keahlian dan profesi demi mempertahankan hidup." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mendalam Tusi terhadap hakikat sosial manusia,

¹⁵ ATTAFTAZANI, MUHAMMAD IKHSAN. ETIKA PERSPEKTIF NASIR AL-DIN AL-TUSI DALAM KARYA THE NASIREAN ETHICS. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021; 4.

serta relevansinya dalam membangun tatanan masyarakat yang fungsional dan berkelanjutan.

Menurut Nasiruddin Tusi ada 4 tipe politik, bentuk politik yang paling ideal adalah Politik Penguasa, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan bermoral tinggi. Tujuan utama dari model ini adalah mewujudkan kebaikan dan keutamaan bagi seluruh rakyat. Tusi menyebut bentuk ini sebagai “politik dari segala politik” karena dinilai sebagai bentuk pemerintahan tertinggi dan paling sempurna. Ia bahkan mengaitkan model ini dengan konsep Kota Utama dari Farabi, di mana seorang raja-filsuf membimbing masyarakat menuju kebahagiaan hakiki. Dalam sistem ini, kebenaran dianggap tunggal, dan pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menuntun rakyat pada kebenaran tersebut.

Sebaliknya, Politik Kekuasaan adalah bentuk pemerintahan yang paling rendah menurut Tusi. Dalam sistem ini, kekuasaan dijalankan melalui paksaan, ancaman, dan kekerasan. Tidak ada orientasi moral di dalamnya, dan tujuan utamanya hanyalah mempertahankan kendali atas rakyat, bukan kesejahteraan mereka. Politik semacam ini rawan membawa penindasan dan ketidakadilan karena tidak memiliki dasar etika yang kuat. Maka dari itu, Tusi sangat menekankan pentingnya moralitas dalam setiap bentuk kekuasaan agar tidak berubah menjadi tirani.

Selain itu, Tusi juga mengidentifikasi dua bentuk politik lainnya, yaitu Politik Kemuliaan dan Politik Komunitas. Politik Kemuliaan lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat dan keutamaan manusia. Bentuk ini mirip dengan pemikiran Farabi yang menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dalam pemerintahan. Sementara itu, Politik Komunitas adalah bentuk pemerintahan yang mengelola masyarakat berdasarkan hukum-hukum ilahi. Ini menunjukkan

bahwa Tusi tidak sepenuhnya mengikuti pendekatan Farabi yang cenderung sekuler, karena ia memasukkan unsur religius sebagai dasar pengaturan sosial. Bagi Tusi, agama dan politik bisa berjalan beriringan demi menciptakan keteraturan dan kebijakan dalam masyarakat.¹⁶

Etika politik menurut Nasiruddin Tusi tidak bisa dipisahkan dari moral pribadi. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk cerdas atau kuat, tetapi yang paling penting adalah ia memiliki karakter moral yang baik. Kepemimpinan menurut Tusi harus berlandaskan pada keadilan, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam pandangannya, kekuasaan hanyalah alat yang tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Pemimpin yang baik harus memperlakukan rakyat seperti anggota keluarganya sendiri, memprioritaskan kesejahteraan mereka, dan menghindari bentuk kekuasaan yang tiranik.

Pemikiran Tusi tentang etika politik banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani klasik, terutama gagasan-gagasan dari Plato dan Aristoteles. Namun, Tusi tidak hanya menyalin ide-ide itu begitu saja. Ia mengintegrasikannya dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga membentuk suatu sistem filsafat etika yang khas. Ia melihat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan moral dan spiritual, dan hal itu hanya bisa tercapai jika masyarakat secara keseluruhan dikelola dengan prinsip-prinsip yang etis. Oleh karena itu, politik bagi Tusi bukan sekadar seni mengatur negara, tapi juga sarana untuk menuntun manusia menuju kesempurnaan.

Karya *The Nasirean Ethics* menjadi sangat penting karena berhasil memadukan berbagai tradisi pemikiran dan menjadi rujukan utama dalam etika

¹⁶ "Political Thought of Khwaja Nasir al-Din Tusi," *jpolitic.com*, diakses Mei 2025, <https://jpolitic.com>

Islam klasik. Tidak hanya membahas perilaku individu, tetapi juga menawarkan pandangan filosofis yang dalam tentang bagaimana seharusnya masyarakat dan negara dijalankan. Melalui karya ini, Tusi mengajak pembacanya untuk memahami bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan kebijakan, dan bahwa tanggung jawab moral adalah fondasi bagi setiap bentuk kepemimpinan yang adil.

Pemikiran politik Nasiruddin al-Tusi paling jelas tercermin dalam karya *Akhlaq-i Nasiri*, yang memadukan filsafat etika dengan teori kenegaraan. Bagi al-Tusi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya organisasi politik. Ia memandang negara sebagai institusi penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Al-Tusi menjabarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, rasional, dan berakhlik mulia. Seorang pemimpin ideal menurutnya harus mengedepankan hikmah (kebijaksanaan) dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengatur rakyat secara adil dan merata.¹⁷ Pemikiran ini menunjukkan pengaruh kuat dari filsafat politik Aristoteles, namun dengan nuansa nilai-nilai Islam yang kuat.

Al-Tusi juga menyoroti pentingnya struktur sosial yang teratur dan sistem pendidikan yang mendukung pembangunan moral masyarakat. Ia menyatakan bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada kekuasaan militer atau hukum semata, tetapi juga pada tatanan moral dan spiritual rakyat.¹⁸ Dalam konteks ini, ia mengembangkan konsep hikmah amaliyyah (praktik kebijaksanaan), yakni perpaduan antara etika pribadi dan keterlibatan dalam

¹⁷ Davari, Mahmoud. *The Political Thought of Nasir al-Din Tusi*. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies, 2000, hlm. 42–45.

¹⁸ Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press, 1968, hlm. 151–153.

kehidupan sosial-politik.¹⁹ Menurutnya, kehancuran suatu negara terjadi bukan hanya karena lemahnya pertahanan, tetapi juga karena runtuhnya nilai-nilai akhlak di antara penguasa dan rakyat. Pemikiran politik al-Tusi memiliki relevansi kuat dalam diskusi modern tentang tata kelola pemerintahan yang etis dan berorientasi pada keadilan social.

C. Pemikiran Etika Politik Immanuel Kant

Immanuel Kant, seorang filsuf abad ke-18, mengembangkan konsep moralitas yang berfokus pada kewajiban moral yang bersifat universal dan berdasarkan prinsip rasional. Ia memperkenalkan gagasan *imperatif kategoris*, yaitu prinsip moral yang mengikat semua individu tanpa memandang keinginan pribadi atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut Kant, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang dilakukan karena kewajiban moral itu sendiri, bukan karena mempertimbangkan hasil atau akibatnya. Etika, bagi Kant, tidak bisa bergantung pada perhitungan untung dan rugi, tetapi harus berdasarkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu, tanpa terkecuali.²⁰

Kant menekankan bahwa moralitas harus dilihat dari prinsip objektif dan universal yang berlaku bagi setiap orang. Ia menyatakan bahwa setiap individu memiliki martabat inheren sebagai makhluk rasional, yang memerlukan penghargaan terhadap nilai-nilai moral, kebebasan, dan otonomi moral. Dalam pandangan Kant, martabat manusia mengharuskan setiap individu diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Dengan demikian, prinsip dasar moralitas menurut Kant adalah penghargaan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu.

¹⁹ Al-Tusi, Nasir al-Din. *Akhlaq-i Nasiri*, terj. dari bahasa Persia oleh G.M. Wickens. London: George Allen & Unwin, 1964, hlm. 112–115.

²⁰ Dwifani, Mentari. "Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius." (2023); 3-5.

Karya *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (GMS) atau *Groundwork of the Metaphysics of Morals* karya Immanuel Kant menjadi fondasi penting dalam pemikiran etika moralnya. Meskipun dianggap sulit dipahami, karya ini bertujuan menyusun prinsip dasar moralitas melalui pendekatan rasional, bukan dari pengalaman empiris seperti rasa senang atau untung-rugi. Dalam GMS, Kant memperkenalkan konsep utama yaitu *imperatif kategoris*, yang merupakan prinsip moral tertinggi dan berlaku universal. Bagi Lili Tjahjadi, pendekatan Kant ini adalah bentuk etika apriori yang sepenuhnya berakar pada akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.²¹

Selanjutnya, Kant percaya bahwa tindakan moral yang benar harus dilakukan dengan niat baik dan kesadaran penuh terhadap kewajiban moral. Niat baik menjadi faktor utama dalam menilai apakah sebuah tindakan benar secara moral. Bagi Kant, tindakan tersebut harus didorong oleh kesadaran rasional akan kewajiban, bukan oleh hasil atau keuntungan yang mungkin diperoleh dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif Kant, kebaikan sebuah tindakan bukan terletak pada tujuan yang dicapai, tetapi pada niat untuk melakukan kewajiban moral itu sendiri.²²

Pendidikan etika, menurut Kant, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang bermoral. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya melibatkan pengajaran keterampilan atau pengetahuan, tetapi juga membentuk disiplin batin dan karakter moral individu. Dengan mengatasi dorongan alamiah dan mengembangkan pemahaman mengenai kewajiban moral, seseorang dapat menjadi makhluk yang memiliki moralitas. Kant menganggap

²¹ TONTA, REX FIRENZE. "Problem Etis Proyek Food Estate di Indonesia Ditinjau dari Etika Immanuel Kant." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30.2 (2024): 90.

²² Fattah, Galuh Nur. "Tinjauan Etika Deontologi Immanuel Kant Terhadap Praktik Dāna Dalam Buddhisme: Sebuah Kajian Filosofis Atas Teks Dānamahapphala Sutta." *PATISAMBHIDA: Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama* 5.1 (2024):47-50.

etika sebagai bagian integral dari pendidikan, di mana individu dilatih untuk berpikir secara mandiri dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang rasional.

Kant juga menekankan pentingnya otonomi moral, yang berarti kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan prinsip moral yang rasional. Dalam pandangan Kant, setiap individu harus mampu berpikir secara mandiri, membuat keputusan moral, dan bertindak sesuai dengan kewajiban moral yang dipilih melalui akal budi mereka. Otonomi moral ini adalah elemen penting dalam etika Kant, karena ia percaya bahwa hanya dengan kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan rasio dan kewajiban moral, individu dapat mencapai kehidupan moral yang sejati.²³

Immanuel Kant memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kebenaran dan hubungannya dengan politik. Ia melihat kebenaran sebagai sesuatu yang berasal dari kewajiban moral individu, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip *imperatif kategoris*. Menurut Kant, kebenaran tidak dapat dinegosiasikan atau dikorbankan demi tujuan politik atau kepentingan pribadi. Kebenaran adalah prinsip moral yang harus dijunjung tinggi, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan pribadi. Dalam pandangannya, politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang kuat, dengan pemerintah dan pembuat kebijakan bertindak sesuai dengan kewajiban moral mereka. Kebenaran dalam politik harus tetap dijaga, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan hasil yang diinginkan.

²³ Al-Huda, Ahmad Adrian Fahmi, et al. "PENDIDIKAN ETIKA PERSPEKTIF IMMANUEL KANT DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI ABAD 21." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11.3 (2024): 861-862.

Pemikiran Kant ini juga membentuk dasar bagi gagasan "negara hukum", di mana pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip moral yang telah ditetapkan. Kant menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam politik untuk memastikan prinsip moral diterapkan dalam pengambilan keputusan. Bagi Kant, mewujudkan keadilan sosial adalah kewajiban moral yang harus dijalankan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah. Kebenaran, menurutnya, bukanlah variabel yang dapat disesuaikan untuk kepentingan politik, melainkan landasan yang harus ditegakkan dalam dunia politik untuk menciptakan keadilan sosial yang sejati.²⁴

Immanuel Kant menekankan bahwa politik harus berlandaskan pada prinsip moral yang universal dan rasional. Dalam karyanya *Metaphysics of Morals*, Kant mengembangkan konsep imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang berlaku tanpa syarat dan harus diikuti oleh semua individu dalam setiap situasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi etika politiknya, yang menuntut agar tindakan politik selalu sesuai dengan kewajiban moral, bukan berdasarkan konsekuensi atau keuntungan pribadi.²⁵

Kant membedakan antara politik moral dan politik despotik. Politik moral mengacu pada pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang rasional, sementara politik despotik adalah pemerintahan yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan prinsip moral. Kant menekankan pentingnya kebebasan politik yang didasarkan pada hukum

²⁴ Bendianto, Septian, Riyanto Armada, and Mathias Jebaru Adon. "REPRESENTASI KEBENARAN (VERUM) DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA: Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant." *Aggiornamento* 4.02 (2024): 3-4.

²⁵ Beck, Gunnar. "Immanuel Kant's Theory of Rights." *Ratio Juris* 19, no. 4 (2006): 371-401.

yang adil dan rasional, serta menolak segala bentuk pemerintahan yang menindas kebebasan individu.²⁶

Dalam konteks ini, Kant juga mengembangkan konsep "negara hukum" (Rechtsstaat), yaitu negara yang dibangun berdasarkan hukum yang adil dan rasional, yang menjamin kebebasan dan hak asasi manusia. Negara hukum ini harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk mengejar kebahagiaannya sesuai dengan prinsip moral.²⁷

D. Pemikiran Etika Politik Nasiruddin Tusi dan Immanuel Kant

1. Perbedaan

Etika politik Nasiruddin Tusi dan Immanuel Kant memiliki perbedaan mendasar baik dari segi pendekatan maupun landasan moralnya. Etika politik menurut Nasiruddin Tusi berakar kuat pada perpaduan antara filsafat Yunani klasik dan ajaran Islam. Ia melihat bahwa tujuan utama dari politik adalah untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Dalam pandangannya, seorang pemimpin ideal bukan hanya harus cerdas dan kuat, tapi juga memiliki karakter yang luhur, adil, dan bertanggung jawab secara moral. Politik menurut Tusi tidak hanya sekadar seni memerintah, melainkan merupakan instrumen untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab. Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang berlandaskan pada hukum ilahi dan nilai-nilai agama, yang akan menuntun rakyat seperti anggota keluarga sendiri menuju kehidupan yang lebih baik.

²⁶ McKean, Benjamin L. "Kant, Coercion, and the Legitimation of Inequality." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 25, no. 4 (2022): 528–550.

²⁷ Taylor, Charles. "The Political Cultivation of Moral Character: Kant on Public Moral Feeling as a Precondition for Right." *Polity* (2012).

Berbeda dengan Tusi, Immanuel Kant mengembangkan etika politiknya dengan pendekatan yang sepenuhnya rasional dan sekuler. Ia menekankan bahwa dasar dari etika adalah imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang bersifat universal dan harus dijalankan karena kewajiban moral itu sendiri, bukan karena manfaat atau hasil yang diharapkan. Kant menolak segala bentuk politik yang menghalalkan cara demi mencapai tujuan. Bagi Kant, tindakan politik hanya bisa disebut benar jika didasarkan pada niat baik dan prinsip rasional, bukan pada hasil akhir. Ia juga memperkenalkan konsep "negara hukum" (Rechtsstaat) di mana hukum dan kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai moral dan menghormati martabat manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa perbedaan utama antara Tusi dan Kant terletak pada sumber nilai moral dan cara pandang terhadap kekuasaan. Tusi menjadikan agama sebagai fondasi utama dalam membangun etika politik dan menekankan peran sentral pemimpin sebagai pendidik moral bagi masyarakat. Sementara Kant mendasarkan etika politik pada rasionalitas murni dan kewajiban moral yang objektif, di mana setiap individu, termasuk pemimpin, harus tunduk pada prinsip etis yang berlaku universal. Jika Tusi menekankan pencapaian kesempurnaan dan harmoni dalam masyarakat melalui moralitas dan agama, maka Kant lebih menekankan pada pelaksanaan kewajiban moral yang rasional sebagai dasar dari tatanan politik yang adil.

2. Persamaan

Meskipun berasal dari dua latar belakang yang berbeda Nasiruddin Tusi dari tradisi filsafat Islam abad pertengahan dan Immanuel Kant dari tradisi filsafat Barat modern keduanya memiliki pandangan yang sejalan dalam hal pentingnya moralitas dalam kehidupan politik. Baik Tusi maupun Kant meyakini bahwa kekuasaan politik tidak boleh dijalankan tanpa dasar etika. Bagi mereka, politik

tidak semestinya menjadi ruang bebas nilai di mana tujuan membenarkan cara, tetapi justru harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa seorang pemimpin harus memiliki landasan moral yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan tata pemerintahan yang adil.

Selain itu, keduanya juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Menurut Tusi, pemimpin ideal adalah yang memperlakukan rakyatnya seperti anggota keluarganya sendiri, menunjukkan rasa sayang dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan yang diambil. Kant pun memiliki pandangan yang serupa, bahwa setiap individu, termasuk pemimpin, harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan konsep martabat manusia dalam etika Kant, di mana pemimpin harus menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan.

Akhirnya, baik Tusi maupun Kant menempatkan kebijakan, keadilan, dan keteraturan sosial sebagai tujuan utama dari politik. Meski metode dan sumber moralitas mereka berbeda, Nasiruddin Tusi mengandalkan wahyu dan filsafat, sementara Kant mengandalkan akal dan imperatif kategoris, keduanya percaya bahwa masyarakat yang baik hanya bisa terbentuk bila dipimpin oleh pemimpin yang bermoral dan sistem politik yang etis. Politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan medium untuk mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih adil, tertib, dan bermartabat.

3. Relevansi di era sekarang

Pemikiran etika politik Immanuel Kant dan Nasiruddin Tusi memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks politik kontemporer. Kant menekankan pentingnya prinsip moral universal melalui imperatif kategoris, yang menuntut

tindakan politik dilakukan berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil atau keuntungan pribadi. Ia juga menolak imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung konsep warga dunia yang kemuadian bebas bergerak antarnegara, mencerminkan pandangannya tentang keadilan global dan hak asasi manusia.²⁸

Di sisi lain, Tusi menekankan bahwa politik harus berlandaskan pada moralitas pribadi dan kepemimpinan yang bijaksana. Ia mengidentifikasi empat tipe politik, dengan "politik penguasa" sebagai bentuk ideal, yang dipimpin oleh pemimpin bermoral tinggi yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Tusi juga menekankan pentingnya struktur sosial yang teratur dan sistem pendidikan yang mendukung pembangunan moral masyarakat.²⁹

Kedua pemikir ini menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan prinsip moral yang kuat dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kant melalui imperatif kategorisnya dan Tusi melalui konsep kepemimpinan bermoral tinggi, keduanya menolak penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka juga menekankan pentingnya struktur sosial yang adil dan sistem pendidikan yang mendukung perkembangan moral individu.

Dalam konteks era modern, pemikiran mereka tetap relevan. Kantianisme, dengan penekanannya pada moralitas universal dan hak asasi manusia, memberikan landasan bagi kritik terhadap praktik politik yang tidak adil dan eksploratif. Sementara itu, pemikiran Tusi mengingatkan kita akan pentingnya kepemimpinan yang bermoral dan struktur sosial yang adil dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kedua pemikiran ini mengajak kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai moral dalam politik dan pentingnya

²⁸ Wasim, "Immanuel Kant's Legacy and Relevance in Today's World," *ForumIAS Blog*, May 23, 2024, <https://forumias.com/blog/immanuel-kants-legacy-and-relevance-in-todays-world/>.

²⁹ Sabrina P. Ramet, "Kant on Ethics and Politics," *Eastern Review* 8 (2019): 183-199, <https://doi.org/10.18778/1427-9657.08.08>.

kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global saat ini.³⁰

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa etika politik adalah landasan penting bagi pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui studi komparatif terhadap pemikiran Nasiruddin Tusi dan Immanuel Kant, ditemukan bahwa keduanya sama-sama menempatkan moralitas sebagai inti dalam praktik politik. Tusi menekankan pentingnya karakter individu, stabilitas ekonomi, dan kepemimpinan bermoral dalam kerangka nilai Islam dan filsafat klasik. Sementara itu, Kant menekankan kewajiban moral universal melalui prinsip imperatif kategoris yang rasional dan bebas dari kepentingan pribadi. Keduanya menolak politik yang pragmatis dan menekankan pentingnya prinsip etis yang konsisten. Meski berbeda pendekatan—Tusi bersifat integratif spiritual-empiris dan Kant lebih rasional-sekuler—pemikiran mereka relevan dalam menjawab tantangan etika politik masa kini, serta membentuk kepemimpinan yang adil, etis, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, et al. "Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli Dan Al Mawardi." *Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 10, no. 2 (2023).
- Al-Huda, Ahmad Adrian Fahmi, et al. "Pendidikan Etika Perspektif Immanuel Kant dalam Pendidikan Islam di Abad 21." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 3 (2024).

³⁰ Stefan Dege, "Why Kant's Philosophy is Still Relevant Amid Today's Wars," April 22, 2024, <https://www.examplelink.com> (accessed May 20, 2025).

- Al-Tusi, Nasir al-Din. *Akhlaq-i Nasiri*, terj. oleh G.M. Wickens. London: George Allen & Unwin, 1964.
- ATTAFTAZANI, Muhammad Ikhsan. *Etika Perspektif Nasir al-Din al-Tusi dalam Karya The Nasirean Ethics*. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Beck, Gunnar. "Immanuel Kant's Theory of Rights." *Ratio Juris* 19, no. 4 (2006).
- Bendianto, Septian, Riyanto Armada, dan Mathias Jebaru Adon. "Representasi Kebenaran (Verum) dalam Dunia Politik di Indonesia: Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant." *Aggiornamento* 4, no. 2 (2024).
- Dahlan. "Etika Politik dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, no. 1 (2021).
- Davari, Mahmoud. *The Political Thought of Nasir al-Din Tusi*. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies, 2000.
- Dege, Stefan. "Why Kant's Philosophy is Still Relevant Amid Today's Wars." *DW.com*, April 22, 2024. <https://www.examplelink.com>
- Dwifani, Mentari. "Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius." (2023).
- Effendi, Rahmat. "Kewajiban dalam Pemikiran Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020).
- Fattah, Galuh Nur. "Tinjauan Etika Deontologi Immanuel Kant Terhadap Praktik Dāna dalam Buddhisme: Sebuah Kajian Filosofis atas Teks Dānamahapphala Sutta." *PATISAMBHIDA: Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama* 5, no. 1 (2024).
- Febriany dan Dewi. "Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 4 (2021).

- Jannah, Elly Uzlifatul dan Mohammad Sulthon. "Pengaruh Pemikiran Nashiruddin Al-Thusi terhadap Perkembangan Metode Penentuan Arah Kiblat." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024).
- KARTIKA, I. Made. *Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia*. Widya Accarya, 2015.
- Madani, Adha Santri, Fakhri Putra Tanoto, dan Nisa Halwati. "Immanuel Kant dan Pemikiran Filsafatnya." (2022).
- Mahdi, Mahdi dan Firdaus M. Yunus. "Konstruksi Ilmu Menurut Nashiruddin Ath-Thusi." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 7, no. 1 (2023).
- McKean, Benjamin L. "Kant, Coercion, and the Legitimation of Inequality." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 25, no. 4 (2022).
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press, 1968.
- Pradana. "Pandangan Filsafat pada Etika Moral terhadap Perkembangan Teknologi."
- Putri, Aisyah Ramadanti Mulia, et al. "Empat Persoalan Filsafat Menurut Immanuel Kant." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022).
- Sakhi, Amin dan Kurniati. "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (2024).
- Susanto, Ahmad Budi. "Pemikiran dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-Thusi." *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1, no. 1 (2023).

- Taylor, Charles. "The Political Cultivation of Moral Character: Kant on Public Moral Feeling as a Precondition for Right." *Polity* (2012).
- TONTA, Rex Firenze. "Problem Etis Proyek Food Estate di Indonesia Ditinjau dari Etika Immanuel Kant." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 2 (2024).
- Wasim. "Immanuel Kant's Legacy and Relevance in Today's World." *ForumIAS Blog*, May 23, 2024. <https://forumias.com/blog/immanuel-kants-legacy-and-relevance-in-todays-world/>